

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Kediktatoran Orde Baru telah berkuasa di Indonesia sejak tahun 1965 sampai dengan 1999 (Heryanto, 2018:3). Selama perjalanannya, rezim ini telah merilis beberapa film. Film-film tersebut dibuat oleh organisasi bentukan Soeharto, KOPKAMTIB (Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban)¹. Organisasi tersebut merilis sebuah instruksi yang dikeluarkan pada tahun 1969 (Kep-16/KOPKAMTIB/4/1969), untuk membentuk “Proyek Film KOPKAMTIB”. Instruksi ini berperan untuk memproduksi “film dokumenter” sebagai “media *psywar*” dalam melawan musuh didalam maupun luar negeri. Beberapa judul yang telah dirilis dari instruksi ini yakni *Janur Kuning* (1979, Surawidjaja), *Serangan Fadjar* (1981, Noer), *Pengkhianatan G 30 September* (1984, Noer), *Penumpasan Sisa-Sisa PKI di Blitar Selatan (Operasi Trisula)* (1986, Kadaryono) dan *Djakarta 1966* (1982, Noer) (Heryanto, 2018:118). Film-film tersebut merupakan film propaganda anti-komunis buatan Orde Baru yang memberi perhatian pada kisah fantasi tentang kekejaman dan sifat tidak manusiawi komunis (Heryanto, 2018:175).

¹ KOPKAMTIB merupakan operasi pemulihan yang dibuat oleh Soeharto untuk menumpas PKI. Operasi ini dibuat pada tanggal 2 Oktober 1965 yang dipimpin langsung Soeharto. Operasi ini juga telah mendapatkan landasan hukum dari Soekarno atas Surat Keputusan Presiden/Panglima Tertinggi/Komando Operasi Tertinggi ABRI pada 1 November 1965. Surat ini berisi tentang pemulihan keamanan dan ketertiban setelah 30 September (Tempo, 2013:94)

Dalam praktiknya, film menjadi salah satu dari berbagai alat propaganda yang digunakan oleh Orde Baru, selain buku teks, monumen, nama jalan, museum, upacara peringatan, dan hari raya nasional (Roosa, 2008:9). Dari sekian judul film propaganda, menurut Heryanto, film *Pengkhianatan G 30 September* (1984) adalah film yang paling berpengaruh (Heryanto, 2018:118). Seperti yang dikatakan oleh Heryanto (2018:122):

Film ini mbingkai kerangka induk dan menyeluruh bagi diskusi publik, angan-angan, dan kiasan sepanjang periode Orde Baru. Pernyataan dan pertanyaan publik yang meragukan keabsahan sejarah resmi 1965 atau menyebut kisah berbeda dari ahli luar negeri tentang hal ini, dinyatakan sebagai pelanggaran hukum dan dapat dijatuhi hukuman (2018:122)

Dengan pernyataan dari Heryanto tersebut, mengimplikasikan bahwa pemerintah membentuk usaha untuk membentuk definisi tunggal dari sebuah fenomena atau aktornya. Pendoktrinan mengenai sejarah '65 dibangun sedemikian rupa, dengan jalan hukum, moral, maupun, represif dari militer, masyarakat diarahkan untuk tunduk dengan apa yang pemerintah katakan dan tidak ada ruang negosiasi dari hal tersebut. Dengan bentuk pendoktrinan seperti ini yang dilakukan oleh rezim yang berkuasa terlalu lama di Indonesia, bukan berlebihan akan berdampak serius dalam ketimpangan sosial, seperti berkenaan dengan HAM, keadilan, dan sebagainya.

Selain itu, hal yang menjadi ironi adalah berkaitan dengan munculnya film-film dari organisasi bentukan Soeharto, mengarahkan kepada sebuah kecenderungan dari isi konten tersebut. Seperti pada buku

Film, Ideologi dan Militer (Irawanto, 2017:7), “...(film) *Janur Kuning* dan *Serangan Fajar* diproduksi pada masa Orde Baru, Periode yang ditandai oleh dominannya peranan militer yang ditopang oleh basis ideologi yang kuat”. Dengan situasi politik pada masa itu yang ikut memengaruhi juga², hampir mustahil untuk dilakukan membuat film dengan narasi atas peristiwanya sendiri yang masih kontroversional³(Schaefer dan Wardaya, 2013:233). Kontroversionalnya hal tersebut, menurut Irawanto (2017:4) bahwa pembuat film bukanlah seorang sejarawan, karena permasalahan tingkat akurasi penggambaran dan konstruksi peristiwa. Sehingga, film-film tersebut tercipta dari rezim Orde Baru yang menududuki kursi pemerintahan yang begitu mendominasi, di mana terdapat tendensi tertentu perihal tersebut.

Maka, produk film yang disponsori oleh rezim Orde Baru tersebut memiliki kesamaan. Ini didasari bahwa film-film yang diproduksi pada masa Orde Baru merupakan bentuk pembinaan keabsahan politiknya dengan berdasar pada narasi yang dibuat-buat dan memiliki kontrol sepenuhnya terhadap peristiwa G 30 September (Heryanto, 2018:116). Seperti yang dikatakan juga oleh Heryanto:

² Ada beberapa faktor sebagai situasi politik yang memengaruhi pada masa itu, yakni ‘segitiga politik’ antara PKI, AD, dan Soekarno, perebutan Indonesia sebagai negara sekutu antara Uni Soviet dan Amerika Serikat, dan pembentukan Federasi Malaysia oleh Inggris (Schaefer dan Wardaya, 2013:222-228).

³ Ada juga penjelasan dari Heryanto (2018:10) dalam narasi resmi terdapat penghapusan aspek-aspek rumit, sehingga tidak dimasukkan dalam kitab sejarah resmi tersebut. Dalam karya sastra atau film, hal itu sering menjadikan sebuah cerita yang karikatural hitam putih yang terdiri dari pahlawan yang bertempur dengan penjahat yang pasti mengalami kekalahan. Dalam hal ini, pihak yang kalah itu adalah para penjajah dan kelompok kiri, termasuk yang berpihak pada Soekarno dan anggota PKI beserta para simpatisannya.

...hubungan antara film dan sejarah pembunuhan massal pada tahun 1965-'66 yang telah menyediakan jalan bagi kebangkitan rezim Orde Baru (1965-98), bukanlah sesuatu yang dibesar-besarkan (2018:114).

Hal ini berkaitan dengan apa yang di sebutkan sebagai kudeta merangkak (Roosa, 2012:5). Dengan pamor Soekarno yang besar, seolah tidak ada yang berani untuk menunjukkan pembangkangan kepadanya. Untuk merebut kekuasaan yang dipegang oleh Soekarno, Soeharto menggunakan dalih mengatasi kudeta gerakan partai kiri itu untuk merebut kekuasaan. Dengan keberadaan usaha propaganda tersebut, dalam hal ini film, merupakan bagian dari bagaimana elit pemerintahan berusaha meraih legitimasi kekuasaan dari sebuah kepemimpinan baru di tangan Soeharto yang ingin rezim tersebut bangun. (Roosa, 2012:5). Maka dari itu, kemunculan film-film tersebut menunjukkan usaha dalam mengukuhkan kekuasaan dari rezim Orde Baru.

Dalam melihat film-film sejarah '65 yang telah rilis, menarik untuk melihat sekian judul yang telah dirilis pasca tumbangnyanya rezim Orde Baru. Karena kekuatan rezim Orde Baru ketika itu melemah, sehingga banyak yang berharap pada munculnya kisah tandingan soal sejarah '65 (Heryanto, 2018:164). Sehingga, muncul judul-judul yang menggunakan sudut pandang yang berbeda dari film sebelumnya yang dibuat pada masa Orde Baru. Film yang berjudul *Tjindurian 19* (2009, Aziz dan Susatyo) merupakan kumpulan wawancara dengan seniman Lekra yang pernah menetap atau singgah di rumah yang beralamatkan sesuai dengan judul film tersebut. Di dalamnya berkenaan dengan koreksi penistaan yang diterima Lekra tentang kaitannya dengan PKI yang selama tiga puluh tahun lebih

telah dipropagandakan oleh rezim Orde baru (Heryanto, 2018:166-167). Selain itu, *Pulau Buru Tanah Air Beta* (Nasution, 2016) muncul sebagai film dokumenter yang mengenai cerita penahanan dan kerja paksa di Pulau Buru –pada tahun 1968 sampai 1979. Mengutip dari cinemapoetica.com, Film ini menuturkan narasinya melalui tokoh bernama Hersri Setiawan, seorang sastrawan Lekra –sosok yang juga muncul dalam film *Tjindurian 19-* bersama dengan putrinya, Ken Setiawan, menapak tilas di pulau yang dihuni oleh para ekstrapol tersebut. Kedua film tersebut, sama-sama melihat sejarah '65 dari sudut pandang korban dari orang-orang yang ikut terseret dari peristiwa yang ada pada tahun '65-'66.

Selain dari sudut pandang korban, Pada tahun 2013, *The Act of Killing* (TAOK) rilis di jagad perfilman Indonesia yang mengangkat persoalan yang sensitif ini di Indonesia dari sudut pandang pelaku pembunuhan massal. Menurut Heryanto merupakan film terdasyat yang mengangkat soal sejarah pembunuhan '65-'66 yang akan membawa dampak penting dalam bahasan politis dan moral di Indonesia. Film ini berpusat pada pengakuan dan perenungan beberapa tokoh utama anggota organisasi paramiliter, Pemuda Pancasila, yang ikut berperan dalam pembunuhan orang-orang dan terduga anggota PKI di Sumatra Utara pada 1965-1966, menjadi salah satu bagian dari pembunuhan massal secara nasional (Heryanto, 2018:).

Hal yang penulis lihat dalam fenomenanya sehingga mengadakan penelitian ini adalah kekhasan anti komunis sebagai wacana dominan yang masih subur adanya di masa sekarang. Ini tak lepas dari peran kekuasaan dalam melestarikan wacana tersebut. Seperti yang ditulis di Indoprogress.com dengan judul “Mengapa Isu Komunisme Muncul Kembali Saat Ini?”, salah satu argumen dari penyebab muncul dan

berkembangnya isu dan mobilisasi anti komunisme saat ini adalah, “...terdapat pra kondisi kultural-ideologis yang mengkondisikan isu anti komunisme ini sehingga dengan mudah menggiring respon masyarakat secara luas.” Hal ini berkaitan dengan yang disinggung sebelumnya mengenai propaganda dari pemerintah Orde Baru mengenai komunisme. Propaganda negatif yang dicekoki kepada masyarakat dengan waktu yang lama sangat mempengaruhi cara berpikir masyarakat mengenai kelompok kiri. Oleh sebab itu, dengan pemerintahan demokrasi yang terbuka seperti sekarang ini, seharusnya mampu dan siap menerima terhadap keterbukaan perspektif lain dalam melihat sejarah ’65 dengan lebih baik. Namun selalu ada respon tolakan dari pihak tertentu. Dengan melihat film ini, menjadi menarik karena terdapat pihak tertentu dalam lapisan masyarakat sipil yang memiliki kontribusi dalam merawat wacana tersebut. Sikap organisasi masyarakat bernama Pemuda Pancasila (PP) ini selalu reaktif dalam membuka pandangan baru sejarah ’65 karena memang pernah bergesekan dengan PKI. Dalam website resminya, PP menuliskan penjelasan singkat mengenai PP yang berdiri sebagai respon berdirinya Pemuda Rakyat oleh PKI yang tak jarang terjadi kontak fisik dan menimbulkan korban di kedua belah pihak. Kehadiran PP memang ditugaskan untuk menjadi perisai penyelamat ideologi Pancasila. Melalui perspektif itulah yang penulis temui dalam film *The Act of Killing* dalam melihat kekuasaan dalam perawatan wacana anti komunis tersebut. Penulis memiliki kegelisahan dengan keberadaan film semacam ini yang terus ditolak oleh sipil. Seperti yang disinggung sebelumnya, bahwa film *The Act of Killing* ini seharusnya mampu memberikan dampak baru secara politis dan moral dengan memahami dan melihat kembali sejarah ’65.

Kembali pada pembahasan film buatan rezim Orde Baru, khususnya pada film *Pengkhianatan G 30 September*, Menurut Heryanto, kerangka berpikir ini masuk ke sumsum tulang belakang sebagian besar masyarakat, sehingga mendeskripsikan orang komunis ini sebagai tokoh jahat (2018:122). Dalam pernyataannya juga dalam majalah Tempo edisi khusus, Algojo 1965, penghasut licik yang menjerumuskan orang baik, atau orang jujur yang berikap polos sehingga teracun dengan faham komunisme. Jika mereka dibunuh, maka itu karena nasib buruk atau salah mereka sendiri (2012:121). Sehingga, pasca-1965 bagi kelompok kiri negara Indonesia seakan menjadi neraka bagi mereka (2012: 114).

Hal tersebut dihasilkan dari sebuah propaganda yang dilakukan oleh rezim Orde Baru. Menurut Harold D. Laswell (dalam Nurudin, 2008:10), propaganda adalah teknik untuk mempengaruhi kegiatan manusia dengan merekayasa representasinya. Ini merupakan bentuk kontrol opini yang dilakukan melalui simbol-simbol yang mengandung arti atau menyampaikan pendapat yang kongkrit dan akurat. Ini dilakukan melalui sebuah cerita, rumor, laporan, gambar-gambar, dan bentuk lain yang dapat digunakan pada komunikasi sosial. Lalu menurut Nurudin (2008:11), di dalam propaganda, terdapat proses penyampaian ide, gagasan, kepercayaan atau bahkan doktrin, dengan tujuan mengubah pendapat, sikap, perilaku, individu atau kelompok lain. Propaganda dapat secara efektif mencapai sasarannya dengan memilih media yang tepat, salah satunya adalah melalui film. Maka, apa yang dilakukan oleh rezim Orde Baru, merupakan hasil dari proses propaganda yang terus dibuat oleh pemerintah.

Selain itu, melihat penjelasan dari Bourdieu mengenai teori arena produksi kultural (Karnanta, 2013:5), bahwa konsep arena sendiri memiliki nada dasar 'pergulatan' atau persaingan perebutan posisi-posisi tertentu oleh

agen-agen, dimana hal tersebut membutuhkan serangkaian tindakan atau praktik. Arena produksi kultural selalu berada pada tegangan antara dua sub-arena, yakni arena produksi terbatas dan produksi skala besar. Arena produksi terbatas terkait dengan produksi seni adiluhung yang lebih mementingkan kepentingan kultural daripada laba material. Sedangkan arena produksi skala besar berkenaan dengan budaya pop (televisi, radio, produksi film, dan produksi ‘sastra populer’) yang memiliki prinsip yang terkait dengan modal ekonomi (Karnanta, 2013:8-9). Dari penjelasan tersebut, berarti film di sini dipahami sebagai sebuah arena kontestasi.

Mengenai perebutan posisi atau kontestasi tersebut, kita bisa melihat hubungan dari film dengan wacana. Film dipahami sebagai sebuah wacana yang diungkap melalui media audio-visual dan juga dapat diperlakukan sebagai teks (Haryatmoko, 2016:113). Ini terjadi ketika dalam sebuah wacana, terdapat wacana dominan dan terpinggirkan. Seperti yang dijelaskan oleh Eriyanto (2006:11), bahwa perihal kekuasaan memegang peran dalam hubungan antara wacana dan masyarakat. Penguasa akan membuat kebenaran dan keabsahan dari pengkomunikasian dan persuasi kekuasaan dan dominasi kepada khalayak (Eriyanto, 2006:13). Dalam wacana juga, terdapat kecenderungan bagaimana kelompok dominan akan memilih dan mendukung wacana-wacana tertentu, sehingga wacana tersebut menjadi dominan. Maka dari itu, wacana lainnya akan termarginalkan atau terpinggirkan (Eriyanto, 2006:77). Dalam menarik hubungan pada perihal pertarungan mendapatkan posisi, terkait dengan fenomena di atas, rezim Orde Baru, yang telah menjalani kepemimpinan selama 30 tahun lebih di Indonesia, menjadi pihak yang menang (Heryanto, 2018:117). Sedangkan masyarakat, dalam hal ini masyarakat yang sadar sejarah atau tidak, adalah kelompok yang kalah.

Kita perlu menyadari terjadinya hal tersebut karena relasi kuasa yang berlaku pada saat itu, yakni masa Orde Baru. Di satu sisi, rezim inilah yang memegang kekuasaan dalam struktur sosial politik dan yang mengontrol medium, juga menentukan citra di layar film (Irawanto, 2017:5). Sehingga, berkaitan dengan penjelasan-penjelasan sebelumnya, bahwa ini merupakan usaha untuk memperoleh kepatuhan dari masyarakat mengenai narasi resmi sejarah '65 yang dibuat oleh pemerintah. Menjadi mutlak, dalam pertarungan kedua belah pihak antara rezim Orde Baru dengan masyarakat, pihak dominan yang pasti memenangkan pertarungan dalam arena kontestasi tersebut.

Apa yang membuat peneliti ingin mengangkat permasalahan ini adalah bagaimana permasalahan anti komunis ini terus ada, bahkan pascareformasi setelah memontum keruntuhan rezim Orde Baru. Beragam fenomena pro dan kontra terus terjadi. Mengutip dari tempo.co, Anuar Shah, Ketua Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila (PP), mengungkapkan film *The Act of Killing* itu mendiskreditkan organisasi PP karena sejarah PP yang dimunculkan tidak lengkap melihat juga terdapat korban dari pihaknya pada waktu itu. Juga mantan Ketua Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia pada 1965, Kamaluddin Lubis, akan melakukan upaya hukum terhadap film besutn Joshua Oppenheimer tersebut. Selain dari organisasi masyarakat PP terdapat juga respon penolakan dari pihak militer. Mengutip dari www.bbc.com, ketika para penyintas malapetaka 1965 duduk dalam agenda yang dibuat oleh pemerintah, yaitu Simposium 1965 dengna tujuan mencapai rekonsiliasi melalui pengungkapan kebenaran korban ketidakadilan dalam pembunuhan massal 1965. Namun, pada pemberitaan dari Tempo.co, acara tersebut mendapat respon dari pihak lain dengan mengadakan Simposium Nasional Anti Partai Komunis Indonesia

dengan ketua pelaksana Letnan Jenderal purnawirawan Kiki Syanakri dengan alasan untuk menyeimbangkan pembahasan persoalan sejarah berkenaan dengan PKI. Selain itu, penolakan pemutaran film yang mengangkat tema sejarah '65 di mana dianggap sebagai “tanda kebangkitan komunis”, terjadi di berbagai kota di Indonesia. Mengutip dari bbc.com, salah satu kota yang mengalami hal tersebut berada di Blitar, ketika Post Institut sebagai penyelenggara pemutaran film *The Act of Killing* didatangi petugas kepolisian Polres kota Blitar dan Polres kabupaten Blitar untuk melakukan pembubaran karena tidak bisa menerima surat izin acaranya. Peneliti melihat peran kerja media dalam memberikan informasi kepada khalayak, yang mampu membentuk bagaimana orang dapat berfikir mengenai sesuatu karena kemampuan mengkonstruksi realitasnya (Yusuf, 2005:7-8). Hal ini berkaitan dengan kontestasi yang terjadi antara penguasa dan yang dikuasai. Kontestasi yang terjadi adalah bagaimana media membuat salah satu pihak kalah dalam pertarungan dan tidak mendapatkan tempat pada wacana sejarah '65. Dari penjelasan sebelumnya, maka pihak yang kalah tersebut tidak dimunculkan keberadaannya pada media pada pembahasan sejarah '65, juga citra yang buruk karena penggunaan bahasa yang digunakan oleh media tersebut.

Berdasarkan film *The Act of Killing* atau *Jagal* yang terkait dengan ketiadaan kelompok kiri dalam wacana dominan sejarah '65, dapat dikaji dengan menggunakan metode analisis wacana kritis dengan model Theo van Leeuwen. Metode analisis wacana kritis ini merupakan studi mengenai bahasa atau penggunaan bahasa yang menggunakan paradigma kritis dalam melihat bahasa tersebut, di mana bahasa terlibat dalam kekuasaan, terutama dalam pembentukan subjek dan tindakan representasi dalam masyarakat (Eriyanto, 2006:3-6)

Pada metode analisis wacana kritis tersebut, model yang digunakan adalah analisis wacana kritis model Theo van Leeuwen. Model ini meneliti bagaimana dalam suatu kelompok, pihak dominan yang memiliki kendali dalam menafsirkan peristiwa dan pemaknaannya, sedangkan kelompok yang ada di bawahnya sebagai objek-pemaknaan yang selalu digambarkan secara buruk (Eriyanto, 2006:171). Dalam model ini terdapat dua hal yang diperhatikan, yaitu eksklusi dan inklusi. Eksklusi merupakan strategi yang digunakan dalam menghilangkan aktor dalam pembicaraan. Ada beberapa strategi yang digunakan, yaitu pasivasi, nominalisasi, dan penggantian anak kalimat (Eriyanto, 2006:172-178). Lalu inklusi adalah strategi ketika sesuatu, seseorang, atau kelompok ditampilkan kedalam teks. Strategi itu ada diferensiasi-indiferensiasi, objektifikasi-abstraksi, nominasi-kategorisasi, nominasi-identifikasi, determinasi-indeterminasi, dan asosiasi-disasosiasi (Eriyanto, 2006:178-189). Penggunaan metode analisis wacana kritis pada penelitian ini merupakan berkaitan dengan bagaimana aktor dimunculkan dalam media.

Penelitian mengenai wacana antikomunisme sudah dilakukan sebelumnya yang berjudul, “WACANA ANTIKOMUNISME DALAM TEKS DAN KONTEKS SOSIAL FILM *PULAU BURU TANAH AIR BETA*” oleh Gigih Panggayuh Utomo. Penelitian ini tertarik pada pembahasan bagaimana upaya pengungkapan sejarah yang dilakukan melalui film. Dalam membedah hubungan antara wacana anti-komunisme dengan film *Pulau Buruh Tanah Air beta*, penelitian ini menggunakan analisis wacana kritis model Teun van Dijk. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis, yaitu mengenai wacana dominasi dalam liputan sejarah '65. Namun penulis menggunakan representasi kekuasaan sebagai objek dan analisis wacana kritis model Theo van

Leeuwen sebagai metodenya. Dengan adanya penelitian penulis, akan menambah bahasan mengenai sejarah '65 dalam representasi kekuasaan pada wacana dominan narasi resmi buatan pemerintah mengenai dalam film *The Act of Killing* atau *Jagal*.

Berdasarkan serangkaian fenomena dan segala keterkaitan antara wacana dengan unsur kekuasaan yang tersemat pada film *Jagal*, peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana kekuasaan ditampilkan lewat teks dialog dengan menggunakan metodologi analisis wacana kritis dengan model Leeuwen sebagai alat untuk menggali representasi kekuasaan dalam film *Jagal*.

I.2 Rumusan Masalah

Bagaimana representasi kekuasaan dalam film *The Act of Killing* atau *Jagal* dengan Analisis Wacana Kritis model Theo van Leeuwen?

I.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana representasi kekuasaan yang dimunculkan pada film *The Act of Killing* atau *Jagal* dengan menggunakan metode analisis wacana kritis dengan model Theo van Leeuwen.

I.4 Batasan Penelitian

Penelitian ini memiliki batasan yaitu membahas mengenai bentuk representasi kekuasaan yang diperlihatkan dari dialog dalam film *The Act of Killing* atau *Jagal*.

I.5 Manfaat Penelitian

I.5.1 Akademis

Penelitian ini bermanfaat untuk ikut mengembangkan pengetahuan. Dalam hal ini, ilmu komunikasi dalam memahami metode analisis wacana kritis dalam memahami representasi kekuasaan pada film *Jagal* ini.

I.5.2 Praktis

Penelitian ini dapat ikut menyumbangkan gagasan baru dalam penelitian yang menyangkut wacana dan sejarah 1965-1966.

1.5.3 Manfaat Sosial

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bagaimana penguasa melakukan kegiatan kekuasaannya yang direpresentasikan dalam film *The Act of Killing* atau *Jagal*. Sehingga masyarakat dapat peka terhadap kegiatan pemerintahan yang sedang berlangsung.